

MENGUATNYA ORIENTASI POLITIK PRAKTIS ELIT NU

SEBUAH CATATAN AWAL



Ellyasa KH Darwis
Swamedia Research and
Communication (SRC) Jakarta

Saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah *joke* dari seorang pasangan calon dalam Pilkada di sebuah daerah. “Tokoh NU itu, kalau tidak dirangkul akan mengurangi suara. Tapi kalau tidak dirangkul juga tidak menambah suara.”

Joke ini jelas menggambarkan ke-

kuatan pengaruh politik tokoh NU yang hanya bisa mempengaruhi dirinya. Tapi, sudah tidak lagi bisa mempengaruhi jama'ahnya. Kalimat “bisa mengurangi suara dan tidak bisa menambah suara” menunjukkan bahwa mendekati tokoh NU, untuk optimalisasi penggalangan dukungan suara, itu tidak efektif lagi

Joke di atas terkonfirmasi, ketika beberapa elit atau pengurus NU yang maju dalam kontestasi politik banyak yang tidak berhasil meraih kursi yang diharapkan. Dukungan NU terhadap pasangan JK-Win pada Pilpres 2009, atau Pilpres sebelumnya, 2004, di mana Ketua Umum Tanfidiyah PBNU masuk dalam bursa Cawapres¹. Demikian juga ketika pengurus NU masuk maju dalam bursa Pilkada gubernur, walikota atau bupati. Sederet kegagalan itu, oleh banyak kalangan disebut-sebut bahwa NU tidak bisa dioptimalisasi sebagai mesin penggalangan dukungan

¹ Menurut sebuah sumber, pada saat Pilpres 2004 di mana Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi, dipasangkan sebagai mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dalam Pilpres 2004, pada putaran pertama, warga NU yang memilih pasangan Megawati-Hasyim Muzadi hanya tiga juta saja. Tak urung, hal ini menjadi bahan evaluasi yang hangat dalam tubuh PDIP sendiri. Belakangan PDIP sendiri menyadari bahwa mengambil tokoh NU tidak dengan sendirinya bisa mengambil basis dukungan massa di bawahnya. Dalam sebuah wawancara di sebuah stasiun TV, Sekjend PDIP Pramono Anung mencotahkan, pada saat Pemilu Legislatif, seorang tokoh NU dan Pesantren yang dicalonkan PDIP untuk kursi DPR RI, perolehan suara di TPS-nya sendiri tidak signifikan.

untuk mendapatkan jabatan politik.

Joke di atas sudah barang pasti tidak akan lahir dan berkembang jika saja, tokoh dan elit NU di berbagai tingkatan tidak tergoda untuk ikut terlibat dalam kancah politik praktis. Dengan jumlah pengikut terbanyak, elit NU tergoda untuk memainkan dan mengambil orbit politik sendiri pada era pemilihan langsung seperti sekarang ini.

Keterlibatan pengurus NU dalam berbagai kegiatan politik, seperti pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif dan pemilihan presiden, telah menyeret NU secara organisatoris ke kancah politik praktis². Terhadap kecenderungan seperti itu, banyak kalangan, termasuk di PBNU sendiri yang mengkhawatirkan NU lupa akan gagasan dasar atau khittahnya sebagai organisasi sosial keagamaan dan keumatan. Figur utama NU yang ikut dalam Pilkada menurunkan martabat organisasi. Padahal, mereka selama ini menjadi simbol dan representasi NU. Kondisi ini membuat NU dianggap sebagai alat politik elitnya saja³.

Orientasi Politik Praktis

Selama satu dasawarsa terakhir ini, memang terjadi perubahan orientasi politik di tubuh elit NU. Apabila sebelumnya sangat kental dengan gerakan yang bercorak kultural sebagai implementasi

dari konsep kembali ke khittah 26, kemudian berubah orientasi yang sangat kental dengan nuansa orientasi kekuasaan. Suatu gerakan yang berorientasi untuk mengambil akses politik. Lonjakan dan kegairahan politik di kalangan warga NU meledak penuh euporia politik.⁴

Sejak terjadinya perubahan politik, paska jatuhnya rezim Orde Baru, mulai menguatnya orientasi politik praktis di kalangan warga NU. Desakan itu demikian kuatnya sehingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membentuk tim kecil untuk menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di kalangan warga NU. Oleh karena itu, lahirlah sebuah partai, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai satu-satunya penyaluran aspirasi warga NU.

Sejak saat itu, mulai terjadi perubahan perilaku politik, dari semula non partisan dan bergerak pada tataran gerakan kultural berubah kearah perubahan yang sifatnya struktural. Sebagai organisasi dengan jumlah masa yang besar, memang memerlukan suatu wadah politik yang bisa mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasinya pada tataran kebijakan politik kenegaraan. Meskipun PKB disebutkan sebagai satu-satunya wadah aspirasi politik warga NU, tapi pada prakteknya tidak semua warga NU mengartikulasikan aspirasi politiknya

² *Republika*, Selasa, 31 Maret 2009

³ *Kompas*, Rabu, 20 Februari 2008

⁴ Kegairahan politik yang partisan itu nyaris meluas di mana-mana. Pada Pemilu 1999 misalnya, hampir seluruh pengurus dan tokoh NU terlibat dalam melakukan penggalangan dukungan agar warga Nahdlyin mengartikulasikan politiknya melalui PKB. PBNU dalam Rapat Pleno Ke 4, 24 Juli 1998, menyerukan agar seluruh warga NU memberikan dukungan dan memelihara PKB sebagai satu-satunya partai milik warga NU. Badrun Alaina, *NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja* (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2000), hlm. 103-104.

melalui PKB⁵.

Sebagaimana kelompok masyarakat lainnya, warga Nahdliyin juga mengalami hal yang sama. Pengamatan Martiun van Bruinessen, menggambarkan bahwa saat NU membuat partai politik disambut dengan kegembiraan oleh para tokoh lokal NU. Kegairahan dan rasa suka cita itu, menunjukkan kecenderungan partisipasi di kalangan warga NU cukup tinggi. Dalam Mukhtar NU ke-30 di Kediri, tampak para pemimpin NU lokal yang mengikuti mukhtar sangat senang dengan posisi ketua umumnya, Gus Dur, yang saat itu menjadi orang pertama di negeri ini. Tak hanya itu, banyak delegasi yang mengharapakan terciptanya hubungan yang formal antara NU dan PKB, atau alternatifnya mengubah NU menjadi partai politik lagi.

Meskipun PBNU sudah memfasilitasi berdirinya partai politik, akan tetapi tidak dengan sendirinya bisa memuaskan banyak kalangan. Selain PKB, beberapa tokoh NU juga mendirikan partai. Pada Pemilu 1999 misalnya, ada PKU, PKNU dan PKKNU. Tampak di sini, elit NU memiliki pemikiran dan orientasi politik yang berbeda-beda. Kecenderungan orientasi politik elit NU mencari jalan sendiri-sendiri, sejak PKB selalu diruntung konflik antarfaksi yang ada di dalamnya. Konflik yang terjadi terus tak bisa diselesaikan melalui mekanisme resolusi konflik dan cenderung mencari jalannya sendiri-sendiri yang berujung pada perpecahan, dan kemudian melahirkan partai baru, sebagaimana yang tampak pada

Pemilu 2009, yang melahirkan PKNU.

Fenomena yang semakin jelas pada tataran nasional adalah pada momentum Pilpres. Pada Pilpres 2004 misalnya, hampir semua jajaran pengurus NU terlibat sebagai partisan dalam penggalangan dukungan terhadap pasangan Mega-Hasyim. Demikian halnya pada Pilpres 2009, yang secara jelas-jelas mendukung pasangan JK-Wiranto. Pada dua kasus Pilpres itu, tampak bahwa meskipun elit NU terlibat, akan tetapi tidak mampu mendorong pasangan yang didukung menjadi orang nomor satu dan nomor dua di negeri ini.

Hal yang sama juga pada momentum Pilgub dan Pilkada Walikota/Bupati. Banyak elit NU yang terlibat dan menjadikan jaringan NU sebagai mesin penggalangan dukungan. Pada momentum seperti itu, sering terjadi perseteruan politik antarelit NU di kancah politik praktis. Kepada publik, jama'ah dipertontonkan gesekan-gesekan antarelit NU. Gesekan itu tentu saja melibatkan umat dan berujung pada pengisolasian dan saling mendiskreditkan. Tidak jarang juga terjadi gesekan fisik.

Jelas tampaknya bahwa pergulatan dalam kancah politik praktis itu, tidak lain adalah untuk mendapatkan akses politik. Sangat mudah sebenarnya untuk menjelaskan mengapa elit NU mudah tergiur dalam kancah politik praktis. Tidak bisa dipungkiri dengan menduduki posisi penting di NU itu dengan sendirinya memiliki kesempatan dan akses yang sangat

⁵ NU sendiri telah merumuskan sebuah garis demarkasi yang jelas, tidak bersifat struktural. Hubungan yang terjadi adalah bersifat moral, kultural, historis dan aspiratif. Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, (Logos, Jakarta, 1999), hlm. 108.

luas. Memiliki posisi tawar dan sekaligus modal dukungan untuk terlibat dalam mempengaruhi proses politik yang terjadi. Di atas kertas, dengan jumlah jama'ah yang sangat besar, merupakan modal yang bisa digunakan untuk *bargain* dalam kontestasi politik. Hal ini rupanya, yang membuat beberapa kalangan politik tergiur untuk memininang elit NU. Harapannya adalah akan bisa menjadi mesin pendulang suara dengan memanfaatkan jaringan dan pengaruhnya di kalangan jama'ah. Ungkapan yang sering dikemukakan adalah NU tak ubahnya gadis molek yang menjadi rebutan bagi kekuatan politik yang berkepentingan.

Beberapa Penghampiran

Mengapa NU sebagai organisasi selama ini kerap diseret-seret ke arus politik praktis? Ini tentu berseberangan atau berbenturan dengan komitmen khittah 26. Khittah 26 adalah satu kesepatan organisasi yang hanya akan bermain pada tataran politik moral, di mana harusnya banyak bersentuhan dengan proses pematangan kerja-kerja sosial yang meliputi perbaikan hidup masyarakat, baik pendidikan, keagamaan, ekonomi, dan sosial.

Terdapat beberapa analisis untuk membaca kecenderungan yang terjadi di kalangan elit NU itu. *Pertama*, banyak kalangan menengarai meningkatnya kecenderungan politik pada elit NU itu sebagai suatu yang wajar. Bagaimanapun dalam sejarahnya, NU tidak pernah lepas dari keterlibatannya dengan kancah politik praktis. Sejarah genetika NU memang selalu bersinggungan dengan ruang politik praktis. Bahkan dapat dikatakan secara historis NU berpolitik semenjak kela-

hirannya. Dalam pertengahan dekade rezim Orde Baru, yang sangat represif, NU memutuskan untuk keluar dari kancah politik praktis dan mengambil orientasi kultural untuk memperkuat jama'ahnya.

Kedua, meskipun PBNU sudah memfasilitasi dan menjadikan PKB sebagai satu-satunya wadah aspirasi politik NU, akan tetapi tampaknya oleh elit NU, PKB dianggap tidak memadai sebagai satu-satunya wadah penyaluran aspirasi. Banyak alasan yang dikemukakan, dari PKB yang dianggap 'lupa' terhadap ibu kandungnya, terjadinya konflik yang beruntun dan yang sering bisik-bisik dikemukakan adalah kebijakan politik yang diperjuangkan untuk warga NU. Salah satu kritik yang muncul adalah "seharusnya, PKB mesti nurut NU, bukan malah sebaliknya? PKB semakin lama semakin jauh dari kesadaran sejarahnya. Itu sebabnya, oleh beberapa kalangan, menyebut sebagai PKB tidak bisa diharapkan lagi sebagai wadah artikulasi politik NU. Pada awalnya, memang terdapat harapan yang besar kepada PKB, tapi belakangan melihat manuver dan beberapa gerakan politik elit NU, PKB tampaknya dianggap tidak cukup untuk mewadahi aspirasi NU. Itu sebabnya, pada momentum Pilkada banyak elit NU yang mencari jalan sendiri dan berseberangan dengan agenda politik PKB.

Ketiga, apa yang terjadi di elit NU sekarang ini merupakan cermin dari kelompok masyarakat yang selama bertahun-tahun tertekan. Lalu pada saat era keterbukaan politik seperti sekarang ini, mereka mencari jalannya sendiri-sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi. Sikap seperti ini, terjadi di mana-mana, khususnya pada kelompok masyarakat

yang lama ditekan, dimarginalisasi secara sistematis oleh kekuatan negara. Salah satu ciri khasnya adalah tidak kompak untuk menyatukan aspirasi politik. Semua bertumpu dan berargumen pada masalah kesempatan. Sebagai kelompok warga mayoritas, yang apabila memiliki basis yang luas, akan tetapi pada tataran politik dan ekonomi ditutup



aksesnya secara sistematis, maka cenderung mencari jalan. Ketidakkompakan adalah salah satu ciri khas yang melekat pada masyarakat yang lama mengalami tekanan politik yang sistematis.

Keempat, sebagai bagian dari kelompok-kelompok strategis, akses NU memang sangat terbatas. Sebagai konsekuensi bertahun-tahun mengambil sikap oposisi dengan rezim Orde Baru, maka NU hampir-hampir tidak memiliki kekuatan di sektor ekonomi, birokrasi maupun kelompok strategis yang lain. Upaya marginalisasi yang dilakukan rezim Orde Baru, telah menutup mobilitas vertikal warga NU di berbagai kancah, baik di birokrasi, dunia usaha maupun bidang yang lainnya. Mobilitas vertikal yang ditutup rapat itu, membuat hak-hak sosial, politik, ekonomi dan sosial budaya warga NU tidak terepresentasi. Pada basis massa mayoritas tetapi tidak memiliki mobilitas vertikal, membuat posisi NU dalam kurva kekuatan politik terbalik. Berada dalam

kelas sosial ekonomi dan politik paling bawah, sementara kelompok lain yang minoritas justru memegang peran dan posisi penting dalam percaturan politik.

Sementara, sebagai bagian dari bangsa, kontribusi NU dalam perjuangan politik merebut kemerdekaan sangat besar. Peran itu, hanya karena berseberangan dengan rezim Orde Baru, NU tidak dilibatkan dalam proses-proses politik. Hanya menjadi penonton, dan objek setiap kebijakan politik. Pada situasi dan kondisi seperti itu, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk bisa terlibat dalam masalah politik kenegaraan adalah melalui jalur politik praktis. Prosesnya tidak terlalu lama, dan hanya mengandalkan basis dukungan massa yang kuat. Politik dengan demikian dianggap sebagai satu-satunya jalan. Melalui politik posisi-posisi strategis akan direbut untuk memasukan warga NU dalam formasi kelompok strategis yang ada. Istilah yang muncul dalam wacana dan praksis politik adalah 'ijtihad politik'.

Kelima, kecenderungan memanfaatkan era plutorasi, kalangan pemilik modal kapital yang memadai saja yang memiliki kesempatan untuk mengambil peran politik. Pada era seperti itu, memang kemudian elit NU banyak memainkan peran dirinya sebagai bagian dari mesin kemenangan atau penyuksesan dalam proses politik. Dalam konteks ini menjadi populer istilah *bisyarah* sebagai kompensasi dari keterlibatannya dalam penggalangan dukungan. Pada terminologi ini, politik sering diimplementasikan secara banal sebagai siapa mendapatkan apa dari proses politik yang terjadi. Kalangan yang hendak terjun ke kancah politik, tapi tidak memiliki jaringan yang memadai maka cara yang paling praktis adalah dengan mengambil orbit dan memanfaatkan pengaruh tokoh atau elit. Ini agaknya, yang mendorong banyaknya elit NU yang terlibat dalam dukung mendukung dalam beberapa Pilkada. Asumsinya, dengan memanfaatkan pengaruh tokoh, otomatis para pengikutnya akan mengamini dengan sendirinya.⁶

Keenam, penjelasan lain adalah bahwa menjadi elit itu memiliki posisi dan peran yang strategis. Posisi sebagai elit atau pengurus NU itu merupakan status sosial tersendiri. Dalam dirinya melekat dua hal, yaitu akses ekonomi dan akses politik. Pada momen pemilihan langsung seperti dalam Pilkada, tampaknya membuat

beberapa elit NU tergoda untuk memanfaatkan posisinya untuk meraih akses politik. Ini agaknya yang selama ini dilihat oleh kekuatan politik di berbagai tingkatan untuk melibatkan NU dalam kancah politik praktis. Pengaruh, jaringan dan basis massa menjadi pertimbangan untuk melibatkan diri dalam kancah pergulatan perebutan politik praktis.

Saya tidak tahu, dari penghampiran diatas mana yang lebih memadai untuk menganalisis kecenderungan yang terjadi selama ini. Sudah tentu juga, tidak bisa dijeneralisasi untuk membaca kecenderungan yang terjadi selama ini. Tapi yang jelas, meningkatnya kecenderungan politik praktis itu, telah membawa NU ke dalam kancah kepentingan baik antarparpol maupun aktor politik.

Pada situasi seperti itu, kemudian posisi NU sendiri menjadi sulit karena keterlibatan elitnya yang terlalu jauh dalam kancah politik praktis. Politik tentu saja soal kalah dan menang. Menang berarti aspirasinya akan diakomodasi. Sebaliknya, jika kalah, maka akan dimarjinalisasi atau aspirasinya tidak diperjuangkan. Inilah yang kemudian ketika hingar bingar politik usai, posisi NU menjadi sulit.

Tidak hanya itu, usai perhetalan politik juga meninggalkan persoalan. Pada kantong-kantong basis NU terjadi pragmentasi politik akar rumput. Beberapa hasil Pilkada tampaknya menunjukkan bahwa elit NU

⁶ Secara berseloroh banyak aktivis muda NU yang mengatakan bahwa para tokoh NU yang semula berperan sebagai *cultural broker* beralih menjadi *political broker*. Peran sebagai *cultural broker* yang menerjemahkan gagasan-gagasan abstrak tentang politik modern dan arti negara-bangsa kepada kalangan luas yang umumnya 'tak terdidik'. Lebih jauh tentang peran tokoh NU sebagai *cultural broker*, lihat Clifford Geertz, *Javanese Kiyai: the Changing Role of Cultural Broker, Comparative Studies in Society and History*, No. 2, 1960.

tidak lagi efektif didengar dan diikuti oleh akar rumput. Akar rumput cenderung memiliki aspirasi sendiri yang berbeda dengan yang diinginkan elitnya. Kekalahan calon atau calon yang didukung elit NU pada beberapa Pilkada merupakan indikasi bahwa obsesi politik yang dipikirkan elitnya dengan obsesi politik warganya tidak memiliki titik singgung, atau bahkan berseberangan sama sekali. Apa yang terjadi pada Pilpres 2004, Pilpres 2009, Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jawa Timur misalnya, adalah contoh. Pada Pilkada Jawa Timur misalnya, elit NU menggunakan struktur dan jaringan NU untuk memobilisasi NU. Akan tetapi, kalau kita melihat peta perolehan suara di kantong-kantong NU, kandidat yang didukung elit NU itu cenderung tidak menang di basisnya sendiri. Hal yang sama pada Pilpres 2009, pasangan yang didukung elit NU di Jawa Timur khususnya, tidak mendapatkan dukungan suara yang signifikan.

Politik Tidak Langsung

Dalam tubuh NU memang kini ada dua faksi. Satu faksi yang ingin mempertahankan agar NU sebagai organisasi tidak terbawa dalam kancah permainan politik praktis. Faksi lain, cenderung menggunakan NU sebagai wahana untuk menggagalkan dukungan untuk merebutkan struktur kekuasaan. Kedua faksi itu selama ini bertarung dan ketegangannya selalu muncul pada momen Pilkada. Faksi yang berorientasi kepada politik praktis itu, selalu diingatkan bahwa NU merupakan organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik. Oleh karena itu, NU sebagai

jam'iyah harus konsisten menjadi organisasi sosial keagamaan. Sedangkan jama'ah diberikan keleluasaan dalam menentukan sikap dan aktifitas politiknya. NU harus menjadi zona netral yang menampung beragam aspirasi politik.

Peran dan posisi NU, berada dalam posisi *intermediary* yang menjalankan fungsi kontrol, input kebijakan, komunikasi politik, dan pembentukan opini antara negara dan masyarakat. Untuk itu memang diperlukan bagaimana mengelola urusan politik. Sekarang, belum ada kesepakatan mengenai hal itu di kalangan NU. Memang, ada rumusan yang disebut khittah yang menjadi rujukan ideal tentang karakter keagamaan NU, serta aqidah, pemahaman politik, sosial kemasyarakatan, dan orientasi umum lainnya. Tapi, Khittah 1926 memberi keleluasaan kepada anggota NU untuk aktif di parpol dengan membawa misi NU dengan ketentuan tertentu dan secara kelembagaan memainkan fungsi sebagai kelompok kepentingan. Itu artinya, kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan NU adalah kegiatan politik tidak langsung.

Peran politik tidak langsung, atau tidak berorientasi jangka pendek itu tampak dalam pedoman Politik Bagi Warganya dalam Mukhtamar NU ke-28 di Krapyak-Yogyakarta pada tahun 1989, memutuskan Pedoman Berpolitik Warga NU⁷:

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah

⁷ Sembilan Pedoman Politik Warga NU, www.nu.or.id

- politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integritas bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat;
3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama;
 4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama;
 6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkuat konsensus-konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaq al karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunah Waljamaah;
 7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apa pun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan;
 8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu' dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap terjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama;
 9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.
- Pedoman politik itu tampaknya dirumuskan dengan mempertimbangkan perkembangan politik yang akan terjadi. Sedari awal sudah diperkirakan, NU akan menjadi incaran berbagai kelompok kepentingan politik, khususnya pada saat era demokrasi atau pemilihan langsung seperti yang terjadi sekarang ini. Pedoman politik di atas, sangat jelas tidak mendorong pengurus atau elit NU untuk terlibat terlalu jauh. Sebaliknya, peran yang bisa dimainkan semestinya menjadi menjaga, agar tidak terjadi polarisasi dan gesekan yang tajam di kalangan tokoh dan warga NU. Potensi dan kekuatan jaringan kultural yang dimiliki, untuk menjaga memainkan peran politik moral dalam kontestasi politik.
- Peran yang mestinya dimainkan adalah

menjadi komitmen elit NU untuk tidak memanfaatkan sentimen ke-NU-an untuk kepentingan jangka pendek. Akan tetapi lebih berorientasi kepada jangka panjang, yakni mempertajam orientasi kebangsaan dan jamaahnya, baik di dalam maupun di luar kekuasaan. Dan, menempatkan NU sebagai payung yang mengayomi dan menjamin adanya kebersamaan dan pluralisme melampaui batas-batas kepentingan politik jangka pendek. Dengan demikian, NU akan bisa memainkan perannya untuk menjembatani perbedaan corak dan pandangan politik yang berbeda.

Pelajaran Penting

Pelajaran yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa posisi NU pada tahap yang sangat krusial. Sebagai sebuah organisasi keagamaan, daya galangnya tidak signifikan untuk mendongkrak pasangan yang diusungnya. Sebagai sebuah organisasi besar, jelas NU telah mempertaruhkan diri. Masuk terlalu jauh dalam kancah politik praktis memang beresiko⁸.

Pertama, pada tataran masyarakat kini berkembang atau telah terjadi proses 'atomisasi'. Masyarakat mengerucut dalam ikatan-ikatan dan sentimen-sentimen yang lebih kecil. Ikatan-ikatan ini, dengan sendirinya meluluhkan ikatan-ikatan atau sentimen-sentimen besar. Termasuk di sini sentimen ke-NU-an. Oleh karena itu, sentimen ke-NU-an sering diabaikan dan

lebih memilih memperkuat sentimen yang lebih kecil, yang lebih riil dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, sejauh yang terjadi selama ini, NU belum tampak hadir dalam persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Pembelaan-pembelaan NU terhadap masalah-masalah populis, yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, yang aktif malah orang lain untuk melakukan pembelaan. Oleh karena itu, adanya NU tidak terlalu dirasakan oleh kalangan bawah. Pada kasus-kasus masyarakat urban misalnya, seperti saat pengrusuhan, pembelaan terhadap PHK, TKI, dan lain-lain, NU seolah-olah menjadi aspirasi yang diam.

Ketiga, secara umum dengan terjadinya proses diversifikasi dan difrensiasi masyarakat, ikatan-ikatan primordial akan meluntur. Ikatan ke-NU-an akan kalah dengan ikatan-ikatan profesi yang lebih mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sentimen dan aspirasi masyarakat akan diartikulasikan melalui wadah yang spesifik. Oleh karena itu menjadi wajar adanya, apabila masyarakat lebih terjamin dan terwakili aspirasi melalui wadah-wadah organisasi profesi yang ada.

Keempat, faktor lain yang mempengaruhi adalah perubahan peta demografis yang tajam. Kultur patrimonial yang ditegarai selama ini sebagai basis tumbuh dan berkembangnya NU, telah berubah ke arah pola *patron-clien*. Tingginya angka

⁸ Disebut krusial karena dalam kancah politik praktis tak ubahnya sebuah 'kancah laga peperangan' yang menganut dan setia pada satu alternatif. Menang berarti terbuka akses dan apabila kalah berarti tertutup akses. Pelajaran sejarah paling bagus adalah sejarah NU dalam era Orde Baru, keterlibatan NU dalam kancah politik praktis dalam posisi berhadapan -oposisi-banyak menimbulkan ketegangan-ketegangan serta menghambat kiprah NU sebagai jamaah. Lihat Andree Feillard, *NU vis a vis Negara*, LKIS, Yogyakarta, 1999.

urbanisasi⁹ membuat orang semakin hilang kultur patrimonialnya, ikatan-ikatan itu akan redup dan berganti dengan *patron-client* atau dengan ikatan profesi.

Pada tataran makro-mondial, ikatan ke-NU-an juga sedang dihantam oleh persoalan ekonomi sebagai dampak dari ekonomi pasar. Semua kalangan, sedang bergulat dengan masalah ini. Ikatan ke-NU-an sedang berhadapan, *vis a vis* dengan kebebasan individu yang dibawa oleh kapitalisme. Derasnya arus ini, memang tidak bisa dibendung dan kita tampaknya sudah merasakan adanya kecenderungan meluruhnya ikatan terhadap komunitas.

Kapitalisme seperti diketahui bersama, menginginkan individu-individu untuk dibebaskan sepenuhnya dari ikatan-ikatan primordial agar dapat menentukan pilihan sendiri. Satu sama lain, dengan demikian saling berkompetisi. Oleh karena itu, otoritas tidak lagi tersentral pada individu atau organisasi, sebaliknya otoritas ada di mana-mana.

Tampaknya perkembangan masyarakat yang seperti itu, tidak sempat dibaca secara sungguh-sungguh oleh kalangan ormas, termasuk dalam konteks ini NU. Akibatnya, yang terjadi semacam jurang yang cukup serius antara pengurus NU dengan masyarakat. NU merumuskan dan memformulasikan kepentingan sendiri, sementara masyarakat atau warga NU merasa tidak terwakili narasi yang dikembangkan oleh pengurus NU.

Pertanyaannya kini, dengan konteks serta *setting* seperti itu adalah, apakah NU masih memiliki tempat dalam kehidupan yang akan datang?

Jawabnya tergantung dari bagaimana NU diposisikan dalam kehidupan sosial politik yang akan datang. Apabila masih diformulasikan sebagai kekuatan politik yang apabila ada momentum tertentu digunakan sebagai mesin penggalangan, jelas sudah bisa ditebak masa depannya.

NU memang harus kembali ditempatkan sebagai kekuatan penyeimbang antara pasar, negara dan masyarakat. Ia harus menjadi benteng dari intervensi pasar dan negara yang berlebihan, dengan cara kembali kepada jama'ah untuk didorong dan difasilitasi agar tumbuh kelompok-kelompok mandiri, yang mampu bernegosiasi dengan kekuatan pasar dan kebijakan negara. Oleh karena itu, keinginan untuk bermain dalam wilayah politik praktis, harus ditanggalkan jauh-jauh¹⁰.

Memang perlu dirumuskan secara lebih jauh agar NU bisa hadir dan dirasakan oleh kalangan marjinal yang selama ini dilupakan. Kaum marjinal, jelas secara statistik angkanya sangat besar. NU, diharapkan hadir kembali di tengah-tengah jama'ah, mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Jelas, inilah salah satu cara untuk merekatkan kembali ikatan ke-NU-an.]]

⁹ Sebagai perbandingan angka urbanisasi ke kota pada tahun 1959 sebanyak 5%, sementara pada tahun dekade 90-an mencapai angka 30%. Lihat Andrey Feillard, *NU vis a vis Negara..* hlm. 354.

¹⁰ Padahal NU bisa memainkan peran yang signifikan. Pada masa transisi seperti ini dimana *old social control* lama mulai rapuh, sementara negara belum bisa berartikulasi maksimal, maka NU bisa memainkan sebagai kekuatan *civil society*. Berperan untuk kekuatan sosial-politik, ekonomi dan budaya menjadi dinamis pada arah yang jelas. Joel S. Migdal, *Strong Societies and Weak States. State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1988, hlm. 93-96.